

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011 telah terlaksananya sebagian sesuai amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yakni melakukan rekrutmen secara demokratis, dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi bakal calon anggota legislatif. Tetapi dalam proses rekrutmennya tidak dilaksanakan seleksi kaderisasi karena ada beberapa calon anggota legislatif merupakan kader instan serta dalam penetapan calon anggota legislatif adanya usulan dari ketua dan sekretaris. Dalam proses ini bisa terjadi kurang terbuka, dimana dalam proses penetapan ini seorang ketua dan sekretaris partai menjadi dominan dan penting dalam menentukan lolos atau tidaknya calon tersebut.
2. Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut *Fiqh Siyāsah* ada beberapa hal yang sesuai dengan mekanisme pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dan ada yang bertentangan mengenai syarat-syarat dan pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*. Seperti pada persyaratan memilih dan menetapkan bakal calon anggota legislatif lebih mementingkan faktor ketokohan, popularitas dan finansial yang dimilikinya,

karena para calon anggota legislaif tersebut mempunyai basis massa yang banyak sehingga mendapat suara sebanyak-banyaknya daripada mendominasi calon anggota legislatif yang memiliki kemampuan, kompetensi, kababilitas dan kredibilitas yang memadai serta komunikasi yang baik. Hal ini bertentangan dengan syarat-syarat *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yaitu, adil dengan segala syaratnya, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah), wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling ahli dalam mengelola semua kepentingan. Dalam penerapan cara pemilihannya yang menggunakan praktek pemilihan bakal calon anggota legislatif melalui seleksi dalam kader maupun masyarakat.

B. Saran

1. Untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif yang ada di parlemen diharapkan lebih memperhatikan proses kaderisasi di internal partai.
2. Dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif partai HANURA agar memperhatikan mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan kedailan gender.
3. Pada proses penetapan calon anggota legislatif diharapkan adanya tolak ukur penilaian untuk ketua dan sekretaris partai sehingga lebih terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan publik.